

ABSTRAK

Manusia memiliki Hak Asasi Manusia yang kedudukannya setara dalam masyarakat. Tanpa terkecuali adalah kelompok rentan yaitu Penyandang disabilitas. Berbagai kebijakan mulai hukum internasional, nasional hingga daerah mengatur sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Kebijakan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang penyandang disabilitas tidak mengatur secara spesifik sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan banyaknya hak dan kewajiban penyandang disabilitas di kabupaten Probolinggo tidak terpenuhi. Sehingga banyaknya permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan kebijakan serta urgensi pembentukan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo cukup kompleks serta belum terdapat kebijakan khusus yang mengaturnya. Kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Anak yang tidak cukup dalam melindungi hak-hak bagi berbagai penyandang disabilitas lainnya. Sehingga kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi suatu urgensi agar pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen melalui produk hukum yaitu Peraturan Daerah. Tentunya Hal tersebut berhubungan dengan kewajiban negara terhadap penyandang disabilitas dan kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah, Perlindungan

ABSTRACT

Human beings have equal human rights in society. Without exception are vulnerable groups, namely persons with disabilities. Various policies ranging from international, national to regional laws regulate as a form of government commitment to persons with disabilities. The Probolinggo Regency Regional Policy on Persons with Disabilities does not specifically regulate, resulting in a legal vacuum that causes many rights and obligations of persons with disabilities in Probolinggo Regency not to be fulfilled. So that there are many problems experienced by persons with disabilities. Therefore, this research was conducted to explain the policy and urgency of the formation of regional regulations of Probolinggo Regency on the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities.

The research method used in this research is normative. The approach used in this research is the statue approach. The sources of legal materials used are primary legal sources and secondary legal materials.

The results of this study show that the problems of protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in Probolinggo Regency are quite complex and there is no specific policy that regulates them. The policy used is Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2019 concerning the Implementation of Women and Children which is not sufficient in protecting the rights of various other persons with disabilities. So that the policy in the Formation of Regional Regulations on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities is an urgency so that the Probolinggo Regency government is committed through legal products, namely Regional Regulations. Of course, this is related to the state's obligations towards persons with disabilities and the authority of local governments in the formation of Regional Regulations.

Keywords: Persons with Disabilities, Regional Regulation, Protect

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan	12
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Keaslian.....	13
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1. Jenis Penelitian	15
1.6.2. Metode Pendekatan.....	16
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	18
BAB II.....	20
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.	20
2.1. Peraturan Daerah	20
2.1.1. Asas Pembentukan Peraturan Daerah	22

2.1.2.	Materi Muatan Peraturan Daerah	25
2.1.3.	Proses Pembentukan Peraturan Daerah	27
2.2.	Penyandang Disabilitas	29
2.2.1.	Pengertian Penyandang Disabilitas.....	29
2.2.2.	Jenis Penyandang Disabilitas	33
2.2.3.	Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	35
2.3.	Teori Kewenangan.....	39
2.4.	Teori Perlindungan Hukum.....	44
BAB III.....		49
KEBIJAKAN DAN URGENSITAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.....		49
3.1.	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Melindungi Hak- Hak Penyandang Disabilitas	49
3.2.	Urgensitas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	64
3.2.1.	Bentuk Kewajiban Negara dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas	71
3.2.2.	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	84
BAB IV		93
PENUTUP		93
4.1.	Kesimpulan.....	93
4.2.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2. Kebijakan Perda Disabilitas Kabupaten/Kota di Jawa Timur	64
Tabel 3. Perbandingan Daerah dengan dan tanpa Perda Disabilitas.....	69